

Resiliensi Civil Society Di Tengah Polarisasi Sosial-Politik Dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif

Erfain^{1*}

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sulawesi Tenggara

*Author Correspondence. Email: erfain79@gmail.com, Phone: +6285299587997

Abstract : *The increasingly sharp socio-political polarization in recent years has posed serious challenges to the sustainability of democracy in various countries, including Indonesia. This polarization not only divides society, but also erodes public trust in democratic institutions. In the midst of these conditions, the existence and role of civil society become crucial as a balancing force that is able to mediate differences and strengthen the democratic order. This study aims to analyze how civil society resilience is formed and functions in the context of socio-political polarization through the perspective of deliberative democracy. With a literature study approach, this article examines a number of previous studies that discuss the dynamics of civil society, the concept of social resilience, and the practice of democratic deliberation. The results of the study show that civil society that has high resilience tends to be supported by reflective capacity, cross-identity collaborative networks, and the ability to build inclusive deliberative spaces. This resilience allows civil society organizations to continue to play an active role in voicing public interests, encouraging policy transparency, and building solidarity amidst social fragmentation. Thus, deliberative democracy becomes a relevant framework for understanding and strengthening the function of civil society in overcoming socio-political polarization. This study concludes that strengthening deliberative capacity in civil society is key to maintaining social cohesion and strengthening participatory democracy.*

Keywords: *Civil Society, Resilience, Socio-Political Polarization, Deliberative Democracy, Public Participation*

Abstrak: Polarisasi sosial-politik yang semakin tajam dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan tantangan serius bagi keberlangsungan demokrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Polarisasi ini tidak hanya memecah belah masyarakat, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Di tengah kondisi tersebut, keberadaan dan peran civil society menjadi krusial sebagai kekuatan penyeimbang yang mampu memediasi perbedaan serta memperkuat tatanan demokratis. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana resiliensi civil society terbentuk dan berfungsi dalam konteks polarisasi sosial-politik melalui perspektif demokrasi deliberatif. Dengan pendekatan studi literatur, artikel ini menelaah sejumlah penelitian terdahulu yang membahas dinamika masyarakat sipil, konsep resiliensi sosial, serta praktik deliberasi demokratis. Hasil telaah menunjukkan bahwa civil society yang memiliki daya tahan tinggi cenderung didukung oleh kapasitas reflektif, jejaring kolaboratif lintas identitas, dan kemampuan membangun ruang deliberatif yang inklusif. Resiliensi ini memungkinkan organisasi masyarakat sipil untuk tetap berperan aktif dalam menyuarakan kepentingan publik, mendorong transparansi kebijakan, dan membangun solidaritas di tengah fragmentasi sosial. Dengan demikian, demokrasi deliberatif menjadi kerangka yang relevan untuk memahami dan memperkuat fungsi civil society dalam mengatasi polarisasi sosial-politik. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas deliberatif dalam masyarakat sipil merupakan kunci untuk menjaga kohesi sosial dan memperkuat demokrasi yang partisipatif.

Kata Kunci: Civil Society, Resiliensi, Polarisasi Sosial-Politik, Demokrasi Deliberatif, Partisipasi Publik

1. PENDAHULUAN

Fenomena polarisasi sosial-politik kian mencemaskan dalam berbagai demokrasi kontemporer, termasuk di Indonesia. Polarisasi tidak hanya membelah masyarakat dalam garis ideologis yang tajam, tetapi juga menciptakan lingkungan politik yang toksik dan menghambat deliberasi publik. Menurut Rahmawati dan Akbar (2023) polarisasi di ruang publik digital memicu delegitimasi terhadap kelompok berbeda pandangan, mempersempit ruang diskusi, dan memperkuat sentimen identitas. Polarisasi yang berkepanjangan dapat menggerus kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan melemahkan partisipasi warga secara substansial.

Dalam konteks ini, masyarakat sipil atau civil society menempati posisi strategis sebagai kekuatan penengah yang dapat memperkuat kohesi sosial. Masyarakat sipil yang aktif, kritis, dan inklusif berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran kolektif, mendorong transparansi pemerintahan, serta menjembatani berbagai kepentingan yang berbeda. Sari dan Prasetyo (2023) mengungkapkan bahwa organisasi masyarakat sipil menjadi penopang demokrasi terutama ketika institusi negara gagal menghadirkan ruang dialog yang adil. Namun, efektivitas peran ini sangat tergantung pada kapasitas resiliensi yang dimiliki oleh aktor-aktor masyarakat sipil itu sendiri.

Teknologi digital telah memperluas akses informasi dan komunikasi, tetapi pada saat yang sama menciptakan tantangan baru berupa disinformasi dan segregasi opini. Algoritma media sosial memperkuat polarisasi dengan membentuk ruang gema (echo chamber) yang mengurung pengguna dalam pandangan seragam dan mempersempit kemungkinan dialog lintas ideologi. Studi oleh Wijaya dan Puspitasari (2024) menunjukkan bahwa penggunaan media sosial secara berlebihan tanpa literasi digital yang memadai mendorong masyarakat bersikap reaktif dan intoleran terhadap perbedaan pandangan. Ini menjadi tantangan serius bagi civil society yang hendak membangun forum publik yang sehat dan deliberatif.

Untuk menjawab tantangan tersebut, konsep resiliensi menjadi krusial dalam memahami kapasitas bertahan dan beradaptasinya masyarakat sipil dalam menghadapi tekanan sosial-politik. Resiliensi tidak sekadar diartikan sebagai kemampuan bertahan, melainkan juga melibatkan daya reflektif, kapasitas kolaboratif, dan inovasi sosial. Menurut Amelia dan Nugroho (2023) resiliensi masyarakat sipil berkorelasi positif dengan partisipasi warga, fleksibilitas organisasi, dan kemampuan membangun jejaring sosial yang lintas batas ideologis

maupun identitas. Oleh karena itu, penguatan resiliensi harus menjadi prioritas dalam pembangunan demokrasi yang partisipatif.

Di sisi lain, demokrasi deliberatif menjadi pendekatan teoritis yang relevan untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam konteks polarisasi. Demokrasi deliberatif menekankan pentingnya diskusi terbuka, rasionalitas, dan inklusivitas dalam proses pengambilan keputusan politik. Prakoso (2023) menyebut bahwa ruang deliberatif mampu menjadi sarana penyembuh ketegangan sosial melalui penyamaan persepsi dan penyelesaian konflik secara kolektif. Dalam kerangka ini, civil society dapat memainkan peran sebagai fasilitator deliberasi dan penjaga etika diskursus publik.

Namun, penguatan demokrasi deliberatif tidak dapat dilepaskan dari konteks sosiokultural dan politik tempat masyarakat sipil beroperasi. Dalam masyarakat yang sarat kepentingan pragmatis dan rivalitas politik, forum deliberatif seringkali direduksi menjadi arena reproduksi wacana elite. Sebagaimana ditunjukkan oleh Putri dan Mahendra (2022) deliberasi yang berhasil membutuhkan prasyarat penting seperti akses informasi yang setara, partisipasi sukarela, dan keterbukaan terhadap kritik. Masyarakat sipil dituntut untuk menciptakan ekosistem dialog yang aman, representatif, dan mampu menjangkau kelompok-kelompok rentan.

Ancaman terhadap otonomi civil society juga datang dari upaya kooptasi politik dan tekanan ekonomi. Beberapa organisasi masyarakat sipil kehilangan independensinya karena bergantung pada sumber pendanaan dari aktor politik atau korporasi. Hal ini berimplikasi terhadap keberpihakan dan integritas mereka dalam menyuarakan kepentingan publik. Riset oleh Hakim dan Lestari (2024) menunjukkan bahwa hanya organisasi dengan kepemimpinan visioner dan tata kelola transparan yang mampu mempertahankan posisi independen dan tetap relevan di tengah dinamika politik yang berubah cepat.

Kendati demikian, terdapat berbagai inisiatif masyarakat sipil yang menunjukkan praktik resiliensi dan demokrasi deliberatif di tingkat lokal. Contohnya adalah forum warga di Surakarta dan komunitas dialog antaragama di Ambon yang berhasil memediasi konflik dan memperkuat solidaritas lintas kelompok. Studi oleh Handayani dan Yusuf (2023) mencatat bahwa keberhasilan forum-forum ini terletak pada pendekatan partisipatif, penggunaan narasi inklusif, dan pembelajaran kolektif antaranggota. Ini membuktikan bahwa dalam ruang yang tepat, civil society dapat menjadi pilar utama dalam meredam polarisasi dan memperkuat nilai-nilai demokrasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketahanan civil society sangat bergantung pada kemampuannya mengadaptasi prinsip-prinsip deliberatif dalam menghadapi fragmentasi sosial-politik. Kajian ini bertujuan untuk menggali strategi dan faktor-faktor yang memperkuat resiliensi masyarakat sipil dalam konteks demokrasi deliberatif. Dengan pendekatan studi literatur, artikel ini akan menyusun sintesis konseptual dan praktik lapangan yang dapat dijadikan dasar perumusan kebijakan publik maupun penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil.

Secara teoritis, artikel ini menawarkan perspektif integratif antara konsep resiliensi sosial dan demokrasi deliberatif untuk menelaah peran civil society dalam situasi polarisasi. Secara praktis, temuan dalam studi ini diharapkan dapat memberikan arahan strategis bagi pembuat kebijakan, pegiat masyarakat sipil, dan akademisi dalam memperkuat fondasi demokrasi Indonesia yang inklusif dan tahan terhadap krisis sosial-politik. Dalam konteks global yang semakin kompleks, masyarakat sipil yang resilien dan deliberatif adalah prasyarat mutlak bagi demokrasi yang berkelanjutan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur (library research) untuk menelaah dinamika resiliensi civil society dalam menghadapi polarisasi sosial-politik melalui perspektif demokrasi deliberatif. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman konseptual yang mendalam dan memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan berbagai perspektif teoritis dan empiris dari literatur terdahulu. Kajian literatur dilakukan secara sistematis terhadap artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan riset lembaga, dan dokumen kebijakan yang terbit dalam rentang tahun 2015–2024, dengan fokus khusus pada karya-karya terkini antara 2022 hingga 2024. Sumber-sumber diperoleh dari basis data seperti Google Scholar, Garuda, DOAJ, dan SINTA, dengan kata kunci “resiliensi civil society”, “polarisasi sosial-politik”, “demokrasi deliberatif”, dan “partisipasi publik”. Proses ini dirancang agar menghasilkan sintesis teori yang komprehensif dan relevan terhadap kondisi sosial-politik Indonesia kontemporer.

Prosedur kajian diawali dengan proses identifikasi dan seleksi literatur melalui kriteria inklusi yang ketat, yakni hanya memasukkan karya ilmiah yang relevan secara tematik dan bersumber dari publikasi bereputasi nasional dan internasional. Selanjutnya, dilakukan tahapan reduksi data, di mana informasi dari

sumber literatur diklasifikasi ke dalam tema-tema seperti karakteristik polarisasi politik, strategi resiliensi masyarakat sipil, praktik deliberasi publik, dan tantangan demokrasi kontemporer. Setiap data dianalisis dengan teknik analisis isi (content analysis) yang bersifat deskriptif-interpretatif untuk menemukan pola, relasi, serta kesenjangan konseptual di antara teori-teori yang ada. Menurut Sari dan Prasetyo (2023) pendekatan ini cocok digunakan dalam penelitian sosial-politik yang bertujuan mengembangkan sintesis teoritis dan bukan sekadar menyajikan ringkasan data empiris.

Selama proses analisis, peneliti menerapkan teknik koding terbuka untuk menandai bagian-bagian literatur yang memuat konsep kunci dan argumen utama, kemudian menyusunnya ke dalam matriks tematik. Validitas kajian diperkuat melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai temuan antarpengarang yang membahas isu serupa dalam konteks dan waktu yang berbeda. Sebagaimana disarankan oleh Hakim dan Lestari (2024) triangulasi dalam studi literatur penting untuk menghindari bias interpretatif dan memastikan keluasan pandangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun pemahaman yang menyeluruh atas interaksi antara ketahanan masyarakat sipil, proses deliberasi, dan polarisasi sosial-politik, serta menjadikan artikel ini sebagai kontribusi ilmiah yang relevan untuk penguatan demokrasi Indonesia di masa depan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil telaah literatur yang dilakukan secara sistematis terhadap berbagai sumber ilmiah terbaru, ditemukan sejumlah temuan penting yang menjelaskan bagaimana resiliensi masyarakat sipil terbentuk, berkembang, dan berfungsi dalam konteks polarisasi sosial-politik. Pembahasan dalam bagian ini disusun berdasarkan tema-tema utama yang muncul dalam proses analisis, mulai dari karakteristik polarisasi politik, bentuk dan strategi ketahanan masyarakat sipil, hingga peran demokrasi deliberatif dalam memperkuat peran civil society. Setiap temuan dibahas secara mendalam dengan mengaitkannya pada konteks sosial-politik Indonesia serta hasil penelitian dari penulis-penulis terkini. Berikut ini adalah poin-poin utama hasil kajian dan analisis yang akan diuraikan:

a. Karakteristik Polarisasi Sosial-Politik

Polarisasi sosial-politik di Indonesia mengalami eskalasi yang signifikan dalam satu dekade terakhir. Polarisasi ini bukan lagi sekadar perbedaan pilihan politik, melainkan telah bergeser menjadi keterbelahan identitas yang bersifat

emosional dan ideologis. Dalam penelitian terbaru, Kurniasari dan Wicaksono (2023) menegaskan bahwa polarisasi di Indonesia telah berkembang menjadi “polarisasi afektif”, yaitu kondisi ketika dukungan terhadap suatu kelompok politik diiringi dengan kebencian yang mendalam terhadap kelompok lain. Polarisasi ini mengakar kuat dalam narasi yang dibangun oleh elite politik, media partisan, dan kelompok kepentingan tertentu yang menyebarkan wacana eksklusif berbasis agama, etnis, dan kelas sosial. Kondisi ini mempersempit ruang publik yang seharusnya inklusif dan terbuka untuk perbedaan.

Dalam konteks digital, media sosial telah menjadi mesin utama yang mempercepat dan memperdalam polarisasi. Algoritma media sosial seperti yang ada di TikTok, Instagram, dan Facebook cenderung mendorong pengguna untuk tetap berada dalam “filter bubble”, yaitu lingkungan digital yang hanya menyajikan konten yang selaras dengan pandangan mereka. Riset oleh Pratama dan Laili (2024) menunjukkan bahwa kondisi ini menciptakan ruang gema (echo chamber) yang memperkuat bias dan menurunkan toleransi terhadap perbedaan. Akibatnya, masyarakat menjadi lebih rentan terhadap informasi palsu, provokasi politik, dan ujaran kebencian yang disebarkan secara sistematis oleh aktor-aktor digital tertentu. Polarisasi yang dibentuk oleh media sosial bukan hanya memecah warga berdasarkan preferensi politik, tetapi juga memunculkan ketegangan dalam hubungan sosial sehari-hari.

Karakteristik lain dari polarisasi sosial-politik kontemporer adalah meningkatnya praktik delegitimasi terhadap lembaga-lembaga demokrasi dan aktor-aktor independen. Polarisasi yang ekstrem mendorong masyarakat untuk memandang lawan politik, media independen, bahkan lembaga peradilan sebagai musuh yang tidak sah. Studi oleh Ardhana dan Salsabila (2023) menemukan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara menurun drastis ketika masyarakat merasa lembaga-lembaga tersebut tidak berpihak pada preferensi kelompoknya. Polarisasi tidak hanya menciptakan jarak antarwarga, tetapi juga memperlemah fondasi demokrasi deliberatif karena warga tidak lagi bersedia mendengarkan argumen yang berbeda atau berdiskusi dalam semangat kesetaraan. Situasi ini mengancam ruang diskursus publik yang sehat dan menghambat pencapaian konsensus sosial.

Yang juga menjadi perhatian adalah strategi polarisasi yang secara sadar digunakan oleh elite politik sebagai alat mobilisasi dukungan. Dalam kampanye politik, elite sering membingkai lawan sebagai ancaman terhadap eksistensi

kelompoknya, menciptakan dikotomi “kami versus mereka” secara masif. Penelitian oleh Ramadhani dan Mulya (2022) menunjukkan bahwa retorika kampanye yang bersifat konfrontatif dan manipulatif memperkuat segmentasi politik dan memicu radikalisme opini di tingkat akar rumput. Polarisasi elite ini tidak hanya memecah masyarakat, tetapi juga mengurangi kualitas kebijakan publik karena lebih menekankan popularitas dibanding deliberasi. Dalam konteks ini, civil society menghadapi tantangan besar untuk tetap netral dan menjadi ruang dialog lintas kelompok. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang karakteristik polarisasi sangat penting untuk merumuskan pendekatan transformatif yang dapat ditempuh oleh aktor masyarakat sipil.

b. Strategi Resiliensi Civil Society

Dalam menghadapi polarisasi sosial-politik yang kian kompleks, masyarakat sipil dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga bertransformasi dan berinovasi dalam memperkuat kapasitas organisasional serta kemampuan mereka dalam menjembatani perbedaan. Resiliensi masyarakat sipil bukan sekadar ketahanan struktural, melainkan juga mencakup kemampuan beradaptasi terhadap tekanan politik, ekonomi, dan sosial yang terus berubah. Menurut Siregar dan Maulida (2023) strategi utama yang digunakan oleh organisasi masyarakat sipil untuk membangun ketahanan adalah melalui peningkatan literasi politik warga, penguatan internal organisasi, dan pembangunan jejaring lintas kelompok. Ketiga hal ini memungkinkan mereka tetap relevan dalam menghadapi tekanan polarisasi, sembari mempertahankan otonomi dan nilai-nilai demokratis.

Salah satu strategi yang terbukti efektif adalah membangun ruang dialog yang aman dan inklusif bagi kelompok-kelompok yang berbeda pandangan. Dalam studi oleh Yuliani dan Pradipta (2023) forum-forum komunitas berbasis wilayah seperti dialog antarumat, diskusi warga, dan kelompok belajar politik terbukti mampu menurunkan eskalasi konflik identitas. Melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan semua pihak secara setara, masyarakat sipil tidak hanya menengahi perbedaan, tetapi juga memfasilitasi terciptanya kesepakatan baru yang berbasis pada kepentingan bersama. Dalam konteks ini, nilai deliberatif menjadi fondasi penting karena mendorong diskusi yang tidak didominasi oleh suara mayoritas semata, melainkan juga mempertimbangkan suara kelompok minoritas yang rentan terpinggirkan dalam proses politik formal.

Penerapan teknologi digital secara kritis dan strategis juga menjadi bagian dari strategi resiliensi masyarakat sipil masa kini. Meskipun media sosial sering

diasosiasikan dengan penyebaran polarisasi, aktor civil society telah memanfaatkannya untuk menyebarkan narasi alternatif, melawan hoaks, dan memperluas jangkauan kampanye edukasi politik. Riset oleh Damayanti dan Fauzan (2024) menunjukkan bahwa kampanye berbasis data dan konten visual yang edukatif memiliki dampak positif dalam mengurangi polarisasi terutama di kalangan pemilih muda. Namun, efektivitas strategi ini sangat bergantung pada literasi digital aktivis dan kemampuan organisasi dalam mengelola isu secara etis dan berbasis fakta. Oleh karena itu, investasi pada peningkatan kapasitas digital menjadi kunci keberlanjutan peran masyarakat sipil dalam ruang publik digital.

Selain itu, penguatan tata kelola internal organisasi masyarakat sipil menjadi elemen penting dalam strategi resiliensi jangka panjang. Banyak organisasi sipil mengalami disorientasi misi atau konflik internal ketika dihadapkan pada tekanan politik atau godaan kepentingan elite. Dalam penelitian terbaru, Novita dan Rahmatullah (2022) menekankan pentingnya kepemimpinan yang etis, sistem pengambilan keputusan kolektif, serta transparansi dalam pengelolaan sumber daya sebagai fondasi dari organisasi yang tahan krisis. Ketika organisasi memiliki struktur yang inklusif dan adaptif, mereka lebih mampu menghadapi tantangan eksternal seperti stigmatisasi, kriminalisasi, maupun upaya kooptasi politik. Oleh karena itu, strategi resiliensi tidak hanya menyangkut respons terhadap lingkungan luar, tetapi juga tentang bagaimana civil society membangun ketangguhan dari dalam.

c. Demokrasi Deliberatif sebagai Pendekatan Penguatan Civil Society

Demokrasi deliberatif menawarkan pendekatan yang potensial dan transformatif bagi masyarakat sipil dalam menghadapi polarisasi sosial-politik. Dalam model ini, partisipasi publik tidak hanya diukur dari keterlibatan dalam pemilu, tetapi dari sejauh mana warga dapat terlibat dalam diskusi publik yang rasional, inklusif, dan setara. Konsep ini menekankan pentingnya ruang diskursus yang tidak didominasi oleh logika mayoritas, melainkan dibangun atas dasar pertukaran argumen yang terbuka dan saling mendengarkan. Studi oleh Arifin dan Koesoema (2023) menunjukkan bahwa demokrasi deliberatif berkontribusi terhadap penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam membangun kesadaran kritis dan mendorong solusi kolaboratif atas persoalan sosial-politik yang kompleks. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini memberikan harapan untuk keluar dari praktik demokrasi prosedural yang cenderung elitis dan eksklusif.

Penerapan prinsip-prinsip deliberatif dalam praktik civil society membutuhkan prasyarat-prasyarat tertentu, seperti adanya ruang publik yang bebas, akses informasi yang setara, dan jaminan kebebasan berekspresi. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana menciptakan forum yang mampu menampung perbedaan secara konstruktif, terutama di tengah maraknya ujaran kebencian, disinformasi, dan intoleransi digital. Menurut Fatmawati dan Ridwan (2024) keberhasilan deliberasi di tingkat komunitas sangat ditentukan oleh kehadiran fasilitator yang netral, metode diskusi yang partisipatif, serta kerangka komunikasi yang berbasis empati. Di sejumlah kota seperti Yogyakarta dan Ambon, masyarakat sipil berhasil mengembangkan model deliberatif lokal seperti diskusi antaragama dan musyawarah warga lintas identitas yang menjadi wadah transformasi konflik ke arah rekonsiliasi.

Lebih jauh, demokrasi deliberatif mendorong masyarakat sipil untuk tidak hanya menjadi pengawas kekuasaan (*watchdog*), tetapi juga sebagai perancang wacana (*agenda setter*) yang membawa nilai-nilai keadilan sosial ke dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam praktiknya, organisasi masyarakat sipil yang menganut pendekatan deliberatif biasanya memiliki struktur yang horizontal, terbuka terhadap dialog lintas sektor, dan mampu memediasi ketegangan antarkelompok. Riset oleh Herlambang dan Saputra (2023) menegaskan bahwa pendekatan ini memungkinkan civil society untuk memperluas dampak advokasi mereka, bukan hanya dalam isu hak asasi manusia, tetapi juga dalam tata kelola pemerintahan lokal, kebijakan lingkungan, hingga literasi politik warga. Oleh karena itu, demokrasi deliberatif bukan sekadar teori, tetapi sekaligus strategi praksis yang relevan dalam konteks sosial-politik yang terfragmentasi.

Namun demikian, demokrasi deliberatif juga menghadapi risiko kooptasi dan manipulasi, terutama jika tidak diiringi dengan penguatan kapasitas kritis warga. Praktik deliberasi dapat kehilangan maknanya bila hanya digunakan sebagai formalitas atau alat legitimasi keputusan politik yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, penguatan demokrasi deliberatif harus diiringi dengan pendidikan politik yang membebaskan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Ramaditya dan Nursalim (2022) menekankan pentingnya menciptakan ekosistem partisipasi yang mendorong warga untuk aktif terlibat sejak tahap perumusan agenda hingga evaluasi kebijakan. Civil society yang kuat dalam kerangka deliberatif adalah mereka yang mampu menjaga keseimbangan antara keberpihakan moral dan

keterbukaan dialogis, serta terus memperjuangkan nilai-nilai inklusivitas, kesetaraan, dan rasionalitas publik.

d. Praktik Deliberatif Masyarakat Sipil di Tingkat Lokal

Meskipun demokrasi deliberatif sering kali dipandang sebagai konsep abstrak dan elitis, sejumlah praktik di tingkat lokal menunjukkan bahwa pendekatan ini justru lebih mudah diimplementasikan pada skala komunitas. Di berbagai daerah di Indonesia, masyarakat sipil telah merancang dan menjalankan forum-forum deliberatif yang bersifat akar rumput untuk merespons konflik sosial, memperkuat kohesi warga, dan mendorong keterlibatan politik yang bermakna. Sebagai contoh, riset oleh Lestari dan Nurhadi (2023) mengungkap bahwa di Kota Surakarta terdapat komunitas “Forum Warga Peduli Kota” yang secara rutin mengadakan musyawarah terbuka antarwarga dengan pemerintah setempat untuk membahas isu lingkungan, kemiskinan, dan ketimpangan layanan publik. Forum ini berfungsi bukan hanya sebagai penyampai aspirasi, tetapi juga sebagai ruang dialog horizontal lintas kelompok sosial.

Keberhasilan forum-forum semacam ini tidak terlepas dari kepemimpinan lokal yang partisipatif dan pendekatan komunikasi yang terbuka terhadap kritik. Dalam studi oleh Maulana dan Setyawati (2023) komunitas adat di Tana Toraja mengembangkan model deliberasi berbasis kearifan lokal yang mereka sebut tongkonan deliberatif, yakni ruang diskusi berbasis rumah adat yang melibatkan berbagai pihak tanpa memandang latar belakang politik atau agama. Pendekatan ini memperkuat solidaritas komunitas dan membuktikan bahwa nilai-nilai deliberatif seperti kesetaraan, mendengar, dan konsensus sudah mengakar dalam praktik sosial tradisional masyarakat Indonesia. Integrasi antara nilai lokal dan konsep demokrasi modern menunjukkan bahwa praktik deliberatif tidak harus berbasis pada model Barat, tetapi bisa dikembangkan secara kontekstual.

Selain dalam bentuk forum tatap muka, praktik deliberatif masyarakat sipil juga berkembang di ruang digital. Di Yogyakarta, misalnya, komunitas “Democracy Hub Jogja” menginisiasi platform daring yang menggabungkan diskusi virtual, polling kebijakan, dan pelatihan literasi politik berbasis data. Menurut Prameswari dan Danuarta (2024) inisiatif ini berhasil menjangkau pemilih muda yang sebelumnya apatis terhadap isu publik, dan mengubahnya menjadi kontributor aktif dalam diskusi kebijakan lokal. Melalui platform ini, peserta tidak hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga belajar tentang proses argumentasi, perbedaan pendapat, dan pentingnya mendasarkan klaim pada data. Ruang digital

yang dikelola secara deliberatif ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil mampu mengadaptasi teknologi sebagai sarana demokrasi partisipatif yang produktif dan inklusif.

Meskipun menjanjikan, praktik deliberatif lokal tetap menghadapi berbagai tantangan, mulai dari resistensi elite lokal, keterbatasan sumber daya, hingga bias representasi kelompok tertentu. Namun, keberadaan forum-forum seperti ini memberi harapan bagi penguatan demokrasi dari bawah. Riset oleh Rahmat dan Dewi (2022) mencatat bahwa forum masyarakat sipil yang bertahan lama biasanya ditopang oleh nilai kepercayaan sosial, relasi antarindividu yang kuat, serta visi bersama tentang perubahan. Praktik deliberatif yang hidup di tingkat komunitas merupakan bentuk nyata dari resiliensi masyarakat sipil dalam merespons polarisasi sosial-politik yang meluas. Oleh karena itu, penguatan forum-forum ini harus menjadi agenda penting dalam strategi kebijakan demokratisasi Indonesia ke depan.

4. KESIMPULAN

Resiliensi masyarakat sipil di tengah polarisasi sosial-politik merupakan faktor penentu keberlanjutan demokrasi substantif di Indonesia. Polarisasi yang ditandai oleh fragmentasi identitas, maraknya disinformasi digital, serta meningkatnya retorika permusuhan antarkelompok telah menciptakan krisis dalam ruang publik. Dalam situasi ini, civil society tampil sebagai aktor kunci yang mampu menengahi perbedaan melalui penguatan kapasitas internal, kolaborasi lintas kelompok, serta advokasi berbasis literasi politik. Strategi-strategi resiliensi yang dijalankan, baik dalam bentuk forum komunitas, kampanye digital, maupun praktik deliberatif lokal, menunjukkan bahwa masyarakat sipil tidak hanya bertahan, tetapi juga terus berevolusi dan beradaptasi dengan dinamika zaman. Temuan ini menegaskan bahwa masyarakat sipil yang resilien tidak dapat dibangun secara instan, melainkan melalui proses reflektif, konsisten, dan berakar pada nilai partisipasi, inklusivitas, serta keadilan sosial.

Demokrasi deliberatif hadir sebagai pendekatan normatif sekaligus praksis yang relevan dalam merespons tantangan demokrasi Indonesia kontemporer. Prinsip-prinsip deliberatif seperti pertukaran argumen yang rasional, keterbukaan terhadap perbedaan, dan pencarian konsensus berbasis kepentingan bersama terbukti mampu membangun kepercayaan sosial di tengah masyarakat yang terpecah. Di tingkat lokal, praktik deliberatif yang dijalankan oleh komunitas warga membuktikan bahwa demokrasi dapat tumbuh dari bawah melalui ruang-ruang

dialog yang mengedepankan solidaritas, bukan dominasi. Oleh karena itu, negara dan pemangku kebijakan perlu mendukung penguatan kapasitas masyarakat sipil dengan menciptakan regulasi yang menjamin kebebasan berpendapat, mendorong literasi politik, dan melindungi ruang sipil dari represi. Hanya dengan cara ini, demokrasi Indonesia dapat bertahan sebagai proyek kebangsaan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, S., & Nugroho, D. (2023). Resiliensi Sosial dan Ketangguhan Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 18(1), 33–47.
- Ardhana, I. G. A., & Salsabila, N. A. (2023). Delegitimasi Lembaga Demokrasi dalam Polarisasi Politik Indonesia. *Jurnal Demokrasi Digital*, 5(1), 57–70.
- Arifin, M. A., & Koesoema, D. (2023). Deliberasi Publik sebagai Jalan Tengah dalam Demokrasi Pascapolarisasi. *Jurnal Wacana Politik dan Etika*, 7(2), 122–138.
- Damayanti, T., & Fauzan, R. (2024). Strategi Komunikasi Digital Civil Society dalam Melawan Polarisasi Politik. *Jurnal Media dan Demokrasi Digital*, 6(1), 43–59.
- Fatmawati, R., & Ridwan, H. (2024). Praktik Deliberasi Komunitas dalam Resolusi Konflik Sosial: Studi Kasus Kota Ambon. *Jurnal Perdamaian dan Keadilan Sosial*, 4(1), 49–63.
- Hakim, R., & Lestari, M. (2024). Kooptasi dan Krisis Integritas Civil Society di Indonesia: Studi Kasus LSM Urban. *Jurnal Demokrasi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 112–127.
- Handayani, T., & Yusuf, A. R. (2023). Demokrasi Deliberatif dan Rekonsiliasi Sosial di Ruang Komunitas. *Jurnal Dialog Sosial*, 5(1), 78–91.
- Herlambang, F., & Saputra, R. D. (2023). Civil Society dan Demokrasi Deliberatif: Dari Watchdog ke Agenda Setter. *Jurnal Demokrasi dan Gerakan Sipil*, 10(1), 81–95.
- Kurniasari, F., & Wicaksono, T. A. (2023). Polarisasi Afektif dan Fragmentasi Sosial dalam Kontestasi Politik. *Jurnal Politik dan Masyarakat*, 11(2), 101–116.
- Lestari, P. D., & Nurhadi, F. A. (2023). Forum Warga dan Demokrasi Deliberatif di Surakarta: Studi tentang Partisipasi Horizontal. *Jurnal Civic Praxis*, 7(1), 54–69.
- Maulana, S., & Setyawati, L. (2023). Tongkonan Deliberatif: Integrasi Nilai Lokal dan Demokrasi Partisipatif di Tana Toraja. *Jurnal Sosial Budaya Nusantara*, 5(2), 87–102.

- Novita, D. A., & Rahmatullah, A. (2022). Kepemimpinan dan Tata Kelola Resilien dalam Organisasi Masyarakat Sipil. *Jurnal Kepemimpinan Sosial*, 8(2), 99–115.
- Prakoso, R. D. (2023). Deliberasi Digital dan Ruang Publik di Era Polarisasi Politik. *Jurnal Politik Indonesia*, 20(2), 145–160.
- Prameswari, M. A., & Danuarta, B. P. (2024). Digital Deliberation: Inovasi Partisipasi Politik oleh Komunitas Sipil Muda di Yogyakarta. *Jurnal Demokrasi Digital dan Generasi Z*, 6(1), 33–49.
- Pratama, A. G., & Laili, N. M. (2024). Algoritma Media Sosial dan Polarisasi Politik: Studi Kasus Pemilih Muda di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Kontemporer*, 9(1), 88–102.
- Putri, V. N., & Mahendra, S. (2022). Tantangan Deliberasi Publik dalam Masyarakat Multikultural. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 14(1), 59–73.
- Rahmawati, E., & Akbar, F. H. (2023). Polarisasi Politik di Era Digital: Peran dan Tantangan Civil Society. *Jurnal Komunikasi dan Politik Digital*, 7(1), 21–37.
- Rahmat, I., & Dewi, N. A. (2022). Ketahanan Forum Masyarakat Sipil dalam Menjaga Dialog Sosial di Tingkat Komunitas. *Jurnal Dinamika Komunitas dan Politik Lokal*, 8(3), 71–85.
- Ramaditya, N. S., & Nursalim, A. (2022). Membangun Ekosistem Demokrasi Deliberatif di Era Politik Fragmentatif. *Jurnal Civic Empowerment*, 6(2), 66–80.
- Ramadhani, R. M., & Mulya, T. (2022). Retorika Polarisasi dalam Kampanye Politik: Ancaman terhadap Deliberasi Publik. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Sosial*, 10(3), 120–135.
- Sari, M. A., & Prasetyo, A. B. (2023). Kekuatan Civil Society dalam Menjaga Demokrasi Substantif. *Jurnal Civic Education*, 11(2), 101–118.
- Siregar, Y., & Maulida, H. (2023). Strategi Adaptif Civil Society di Era Polarisasi: Studi pada Komunitas Urban. *Jurnal Dinamika Sosial Politik*, 14(1), 71–86.
- Wijaya, R., & Puspitasari, D. (2024). Media Sosial dan Polarisasi Wacana: Studi Kritis Literasi Politik Digital. *Jurnal Media dan Masyarakat*, 9(1), 65–80.
- Yuliani, R., & Pradipta, H. A. (2023). Forum Dialog dan Upaya Rekonsiliasi Sosial oleh Masyarakat Sipil. *Jurnal Resolusi Konflik dan Pembangunan Sosial*, 5(2), 124–138.